

---

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SOLOK

Nelfia Gusdiva, Hendri Koeswara<sup>2</sup> dan Roni Ekha Putera<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Andalas, Kota Padang

Email: roniekhaputera@soc.unand.ac.id

### Abstrak

Isu kebijakan pencegahan dan penurunan stunting merupakan suatu permasalahan yang menarik perhatian, mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu untuk menekan permasalahan angka stunting yang ada. Kebijakan penurunan stunting yang dikeluarkan pemerintah diharapkan mampu mengatasi permasalahan stunting di Indonesia, namun pada nyatanya angka stunting masih tinggi atau bisa dikatakan tidak mengalami penurunan secara stabil dalam sepuluh tahun terakhir ini. Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah prioritas pemerintah pusat dalam penanganan stunting sejak tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok menunjukkan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, standar kebijakan masih mengacu kepada regulasi kebijakan yang lama dan belum direvisi berdasarkan kebijakan stunting terbaru. Kurang tersedianya sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia serta pengaruh dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok.

**Kata Kunci :** *Implementasi, Kebijakan, Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Solok*

## PENDAHULUAN

Isu kebijakan pencegahan dan penurunan stunting merupakan suatu permasalahan yang menarik perhatian, mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu untuk menekan permasalahan angka stunting yang ada. Kebijakan penurunan stunting yang dikeluarkan pemerintah diharapkan mampu mengatasi permasalahan stunting di Indonesia, namun pada nyatanya angka stunting masih tinggi atau bisa dikatakan tidak mengalami penurunan secara stabil dalam sepuluh tahun terakhir ini. Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah prioritas pemerintah pusat dalam penanganan stunting sejak tahun 2019. Pada Tahun 2019, Kabupaten Solok berada pada posisi ketiga dengan angka stunting tertinggi di Sumatera Barat dengan 10 nagari menjadi lokus stunting. Pada Tahun 2020 Kabupaten Solok berada pada posisi ke-IV dalam penilaian kinerja daerah prioritas stunting. Pada Tahun 2021 angka stunting mengalami kenaikan yang cukup tinggi dengan menempatkan Kabupaten Solok pada posisi pertama dengan angka prevalensi stunting di Sumatera Barat dengan angka prevalensi sebesar 40.1%. Namun pada Tahun 2022 menjadi 24,2%, yang sebelumnya pada Tahun 2021 sebesar 40,1% yang menunjukkan terjadinya pengurangan permasalahan stunting sebesar 15,9%.

Menurunnya angka stunting tersebut tidak terlepas dari adanya peran pemerintah dalam mengatasi stunting. Melihat adanya peran pemerintah dalam mengatasi stunting dan melihat permasalahan yang ada, maka pemerintah daerah berhak mengeluarkan aturan dalam mengatasinya. Berdasarkan amanat Undang-Undang dan Peraturan Presiden, maka Pemerintah Kabupaten Solok mengeluarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting. Kebijakan Peraturan Bupati ini diperkenalkan oleh Kabupaten Solok sebagai bentuk lanjutan dari penurunan stunting di Kabupaten Solok. Intervensi gizi sensitif dan spesifik merupakan bentuk tindakan yang dilakukan.

Melihat dari pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok yang mengacu pada Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Permasalahan yang timbul pada tahap implementasi tergolong cukup mempengaruhi dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Solok. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari ketersediaan sumber daya namun juga mengacu kepada kebijakan itu sendiri. Dalam pelaksanaan intervensi gizi spesifik yang berfokus pada bidang kesehatan dalam pelaksanaannya membutuhkan sumber daya manusia yang mencukupi. Namun masih kurangnya jumlah bidan desa yang tersedia yang tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang ada. Pada umumnya disemua Nagari sudah memiliki bidan desa tetapi jika dibandingkan dengan rasio penduduk per wilayah jumlah bidan desa yang ada belum mencukupi. Hal ini dibuktikan dengan adanya bidan desa yang melayani masyarakat melebihi standar rasio sebenarnya. Pada kegiatan intervensi gizi sensitif melalui beberapa programnya belum terealisasi semuanya, karena pada data rekapitulasi anggaran stunting pada Tahun 2022 belum semua kegiatan memiliki anggaran. Sehingga hal tersebut mempengaruhi upaya penurunan stunting melalui intervensi gizi sensitif.

Dilihat dari tujuan kebijakannya bahwa kebijakan ini sudah dapat dikatakan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan ini sudah jelas yaitu berupaya dalam menurunkan angka stunting yang ada dan dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik. Namun, melihat pada saat sekarang ini peraturan tersebut sudah tidak relevan karena sudah ada pembaharuan aturan pada tingkat nasional, sedangkan aturan ini masih mengacu pada aturan lama sehingga tidak dapat menjawab tujuan dan sasaran permasalahan stunting pada saat sekarang ini. Sehingga bisa dikatakan Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting ini sudah tidak memenuhi standar sebagai aturan dalam penurunan stunting yang merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Mengacu pada kehidupan sosial masyarakat salah satu yang mempengaruhinya adalah pengetahuan masyarakat itu sendiri. Pengetahuan masyarakat yang tergolong rendah mengakibatkan masyarakat tidak terlalu memperhatikan permasalahan stunting tersebut.

Faktor ekonomi juga mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Angka kemiskinan yang tinggi juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Solok masih dikatakan sebagai salah satu kabupaten dengan angka kemiskinan yang tinggi. Pada Tahun 2022 ini angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Solok meningkat yang sebelumnya pada Tahun 2021 sebesar 2.122 menjadi 2.811. Melihat dari data yang ada menunjukkan kondisi perekonomian di Kabupaten Solok yang relatif rendah, hal tersebut dapat mengganggu proses penurunan stunting. Dengan melihat angka kemiskinan yang tinggi ini menunjukkan bahwa ekonomi di Kabupaten Solok tergolong rendah sehingga dengan angka ekonomi yang rendah mengakibatkan para calon orang tua maupun orang tua kurang mampu memberikan asupan yang bergizi kepada bayi. Pada penelitian ini bertujuan untuk dapat menemukan model implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok yang dilakukan oleh beberapa organisasi perangkat daerah terkait.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan dalam penelitian implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pemilihan informan yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Teknik analisis dan keabsahan data mencatat semua fakta yang ada dilapangan yang kemudian akan dilihat atau ditinjau kembali kebenaran dari fakta yang ditemukan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan penurunan stunting dikeluarkan berdasarkan amanat Undang-Undang dan Peraturan Presiden dengan bentuk Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting. Kebijakan Peraturan Bupati yang dikeluarkan oleh Kabupaten Solok sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Solok. Bentuk upaya yang dilakukan yaitu melalui kegiatan intervensi gizi sensitif dan spesifik. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada 1000 Hari Pertama Kehidupan pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek. Sedangkan, intervensi gizi sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan.

## 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil dalam tahap pelaksanaan kebijakannya, jika kebijakan tersebut memiliki kejelasan dalam kriteria dan sasaran maupun tujuan dari kebijakan tersebut. Suatu kebijakan harus memiliki kejelasan dalam standar dan sasaran kebijakan agar pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan dengan semestinya. Dalam hal ini kebijakan yang dilaksanakan adalah Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting.

Kebijakan penurunan stunting yang dilakukan oleh tim koordinasi penurunan stunting di Kabupaten Solok mengacu kepada Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting. Tujuan dari pelaksanaan penurunan stunting sudah dipertegas dalam pasal 4 bab 1 Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 yaitu untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui dua kegiatan yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Untuk mewujudkan pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut tim percepatan penurunan stunting juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 terdapat 6 misi, 6 tujuan, dan 20 sasaran. Dalam RPJMD tersebut terdapat keselarasan antara kebijakan penurunan stunting dengan Misi 5 Pemerintah Kabupaten Solok yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas melalui indikator prevalensi stunting. Namun pada saat ini Kabupaten Solok sedang melakukan perevisian Peraturan Bupati yang ada terkait stunting, sehingga dalam pelaksanaannya masih harus dibantu oleh Peraturan Presiden terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting untuk melihat capaian target yang harus diraih.

Melihat dari indikator terukur dalam kebijakan tersebut sudah ditetapkan target atau capaian dari masing-masing kegiatan penurunan stunting yang dilakukan. Namun dalam tahap pelaksanaannya belum mencapai sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok 80 mengacu

kepada dua kegiatan yaitu intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik. Intervensi gizi sensitif sendiri lebih mengacu kepada bidang kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Sedangkan intervensi gizi spesifik sendiri pencegahan diluar bidang kesehatan, yang dilakukan oleh beberapa dinas yang terlibat. Mengacu kepada dua intervensi yang dilakukan dengan pemberian bantuan baik dari makanan tambahan dan bibit tanaman ke masyarakat atau melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting. Selain itu, juga memberikan layanan fasilitas kesehatan. Namun pada saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sedang dalam tahap pembuatan Peraturan Bupati terbaru mengikuti standar dan sasaran kebijakan terbaru, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting belum sesuai dengan ketentuan standar yang saat ini menjadi acuan nasional yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

Indikator keadilan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dimana kebijakan harus mencakup aspirasi dan keterlibatan masyarakat serta menempatkan masyarakat pada posisi yang sama sebagai target sasaran, semua masyarakat memperoleh perlakuan yang sama atau mempunyai kesempatan yang sama sebagai target sasaran karena setiap dinas yang terlibat mengacu kepada aturan yang sama dalam menempatkan masyarakat sebagai target sasaran yaitu Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting. Selain itu, jika mengacu kepada keadilan dalam memperlakukan implementor, adanya perlakuan yang sama yang diterima dan meratanya penyebaran informasi pada setiap implementor yang terkait.

## 2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang ada menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok. Ketersediaan sumber daya sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok mengingat permasalahan stunting merupakan suatu

permasalahan yang kompleks dan merupakan permasalahan bersama tidak hanya menjadi fokus bidang kesehatan tetapi banyak aspek yang terlibat di dalamnya.

Dari segi sumber daya manusia dapat dilihat bahwa masih terdapat kendala dari ketersediaan sumber daya manusia sebagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Dari segi kuantitas sumber daya manusianya bisa dikatakan cukup memadai namun jika dilihat secara mendalam masih dikatakan sumber daya yang ada masih belum mencukupi. Namun jika kita lihat dari segi kualitas sumber daya manusia bisa dikatakan baik. Hal ini didukung dengan latar belakang pendidikan implementornya yang sesuai dengan penempatannya saat ini dan juga karena diadakannya pelatihan, sosialisasi ataupun kegiatan yang bertema stunting yang nantinya secara tidak langsung kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan para implementornya yang nantinya akan berpengaruh kepada kualitas implementor kebijakan penurunan stunting tersebut. Selain itu dari segi sumber daya finansial juga terdapat permasalahan anggaran yang tidak mencukupi.

**Tabel 1. Rekapitulasi Data Program Penanganan dan Penurunan Prevalensi Stunting**

No	SKPD	Anggaran 2022	Terealisasi
1	Dinas Kesehatan	17.864.083.983	15.472.122.858
2	Dinas PPKBP3A	2.853.590.034	2.065.813.261
3	Dinas Perikanan dan Pangan	334.233.610	289.350.791
4	Dinas PUPR	13.137.733.669	12.032.672.400
5	Dinas Kominfo	450.292.480	360.917.988
6	Bapelitbang	109.000.500	98.744.072
7	DPMN	70.895.000	70.213.000
8	Dinas Pendidikan	7.373.672.100	7.282.595.768
	Total	42.193.501.376	37.672.430.138

Sumber : Rekapitulasi Data Program Penanganan dan Penurunan Prevalensi Stunting Arsip Bapelitbang, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa adanya selisih yang cukup signifikan antara jumlah anggaran yang dianggarkan dengan anggaran yang terealisasi. Kondisi tersebut memberi gambaran bahwa dana yang disiapkan ternyata melebihi dari apa yang dikerjakan. Dari tabel dapat dilihat juga bahwa dari banyaknya dinas maupun badan yang terlibat dalam upaya penurunan stunting tetapi dalam Tahun 2022 hanya delapan dinas yang memiliki anggaran dalam melakukan kegiatan penurunan stunting. Dengan kondisi demikian menggambarkan bahwa anggaran yang ada belum memadai atau mencukupi untuk semua kegiatan jika mengacu kepada banyaknya implementor dalam kegiatan penurunan stunting. Dengan kurangnya anggaran tersebut dapat mengganggu pelaksanaan karena mengganggu kepada setiap kegiatan penurunan stunting, sehingga pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal. Namun jika kita lihat dari penggunaannya dapat dikatakan bahwa anggaran yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal karena tidak terealisasi sepenuhnya. Seharusnya dengan kondisi dimana anggaran yang ada dikatakan kurang dapat memanfaatkan anggaran yang ada semaksimal mungkin. Sehingga dengan terbatasnya anggaran dapat ditutupi dengan pemanfaatan anggaran secara maksimal dan optimal.

Sumber daya waktu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Dengan mendukungnya sumber daya finansial yang ada dapat mengakibatkan suatu kebijakan dapat terealisasi dengan baik karena didukung dengan ketersediaan waktu yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan tersebut. Ketersediaan waktu harus didukung dengan bagaimana memanfaatkan sumber daya waktu yang ada. Dari segi ketersediaan waktu bisa dikatakan secara keseluruhan dinas yang terkait mengagendakan setiap tahun pelaksanaan kebijakan penurunan stunting ini. Jika kita lihat dari segi pemanfaatan sumber daya waktu bisa dikatakan baik sehingga kegiatan penurunan stunting dapat berjalan dengan baik walaupun memiliki kendala dari faktor sumber daya lainnya. Ketersediaan waktu dapat dilihat dari penurunan stunting merupakan perwujudan dari misi ke 5 Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas melalui indikator prevalensi stunting.



### 3. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi sangat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok dibutuhkan hubungan antar organisasi yang baik karena melibatkan banyak organisasi perangkat daerah yang terlibat. Dalam melihat Hubungan antar organisasi pada pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok dilihat melalui indikator komunikasi dan koordinasi.

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis dapat dilihat bahwa tidak adanya kendala terkait komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok. Komunikasi yang terjalin juga memanfaatkan sosial media sebagai salah satu media komunikasi yang membantu komunikasi berjalan lebih efektif dan efisien, karena dalam menyampaikan informasi tidak harus bergantung kepada lokasi penerima informasi yang harus berada di satu lokasi yang sama. Dengan mudahnya komunikasi yang terjalin antar implementor mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan dari kebijakan stunting di Kabupaten Solok. Karena pada dasarnya menjaga komunikasi dan koordinasi yang efektif merupakan fungsi dan tanggung jawab tim penurunan stunting berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting pasal 18 ayat 1.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis menunjukkan adanya koordinasi yang berjalan dengan baik antar organisasi perangkat daerah yang terlibat karena diadakannya rapat setiap bulan maupun rapat koordinasi yang diadakan dua kali dalam setahun. Koordinasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Solok. Yang mana koordinasi dibutuhkan karena dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok melibatkan banyak aktor yang terdiri dari berbagai organisasi perangkat daerah yang ada. Dalam melakukan pertemuan bulanan yang dilakukan berdasarkan apa yang dibutuhkan untuk melakukan agenda pertemuan. Dengan adanya agenda yang sering dilakukan menunjukkan adanya komunikasi dan koordinasi yang berjalan dengan baik dan juga menunjukkan keseriusan dari para

---

implementor dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Solok. Selain itu, menjaga komunikasi dan koordinasi yang efektif lintas sektor merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab tim penurunan stunting berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penurunan Stunting pasal 18 ayat 1.

Selain melalui rapat bulanan dan rapat koordinasi, juga melalui rembuk stunting yang dilakukan sebagai upaya koordinasi yang dilakukan karena melibatkan banyak aktor yang terlibat. Dengan adanya rembuk stunting tidak hanya melibatkan pemerintah daerah saja tetapi juga sampai pemerintahan nagari. Dengan melibatkan banyak unsur pemerintahan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan stunting di Kabupaten Solok.

#### 4. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan sangat diperhatikan karakteristik dari implementor terkait. Dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok harus memperhatikan siapa aktor yang terlibat dan bagaimana peranannya, karena permasalahan stunting tidak hanya menjadi masalah kesehatan saja tetapi banyak aspek di dalamnya. Dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok dilakukan melalui kegiatan intervensi gizi spesifik maupun sensitif, sehingga diperlukan banyak aktor yang terlibat.

Pelaksanaan suatu kebijakan sangat bergantung kepada aktor yang terlibat dan bentuk keterlibatannya. Struktur organisasi sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok karena banyaknya aktor yang terlibat sehingga memberikan pengaruh kepada siapa saja yang terlibat. Struktur organisasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan berhubungan dengan pembagian tugas implementor pada suatu organisasi. Pada pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok dibentuk tim koordinasi yang terdiri dari beberapa instansi terkait. Dalam penelitian ini peneliti melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan stunting yang dilakukan oleh tim koordinasi yang terdiri dari beberapa organisasi perangkat daerah yang tergabung yang diketuai oleh Wakil Bupati Solok

langsung dan Bupati Solok sebagai penanggung jawab dan dianggotai oleh beberapa organisasi perangkat daerah terkait.

Dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting dibentuk tim koordinasi yang bertugas dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Solok. Tim tersebut terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 050-506-2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Data Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2019-2023. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) tersebut merupakan salah satu bentuk realisasi dari Peraturan Bupati Solok Nomor 35 Tahun 2019 sebagai bentuk dari legalitas pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Berdasarkan struktur pelaksana kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok, terdapat beberapa instansi terkait yang dan juga pimpinan daerah serta unsur pimpinan daerah yang terlibat didalamnya. Dalam melaksanakan kebijakan penurunan stunting tim koordinasi penurunan stunting terintegrasi mempunyai beberapa tugas dan fungsi. Tim koordinator memiliki tanggung jawab dalam mencapai tujuan dari kebijakan penurunan stunting melalui tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan dibutuhkan aturan yang mengatur setiap implementor dalam menjalankan peranannya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok dilaksanakan oleh tim percepatan penurunan stunting. Yang mana tim percepatan penurunan stunting merupakan gabungan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas menurunkan angka stunting di Kabupaten Solok. Tim tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor 050-506-2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Data Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2019- 2023. Yang mana dalam keputusan tersebut telah diatur tugas maupun fungsi serta jabatan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan kebijakan penurunan stunting.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dapat dilihat bahwa tidak adanya aturan khusus dalam tim koordinasi penurunan stunting Kabupaten Solok

dalam menjalankan kebijakan penurunan stunting. Namun walaupun tidak memiliki aturan tertulis tidak berdampak negatif dalam menjalankan kebijakan penurunan stunting karena komitmen yang dimiliki oleh masing-masing implementor. Dengan adanya komitmen membantu dalam mencapai tujuan kebijakan. Selain itu didalam Keputusan Bupati Solok Nomor 050-506-2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Data Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2019-2023 sudah diatur bagaimana tugas dan fungsi dari tim koordinasi tersebut.

Pola hubungan dalam sebuah organisasi akan mempengaruhi kepada karakter agen pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan. Pola hubungan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok dapat dilihat dari proses komunikasi dan arus informasi yang terjadi di dalam tim koordinasi penurunan stunting. Indikator pola hubungan dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok sudah berjalan dengan baik. Pola hubungan yang terjadi dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok sudah terealisasi melalui komunikasi yang bagus. Dengan adanya komunikasi yang bagus mendorong tercapainya upaya yang lebih maksimal dalam penurunan stunting karena organisasi perangkat daerah saling berkomunikasi sehingga penyampaian informasi menjadi lebih cepat.

##### 5. Disposisi Implementor

Disposisi implementor sangat mempengaruhi penerimaan atau respon implementor terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Respon yang diberikan implementor sangat mempengaruhi bagaimana upaya yang dilakukan implementor dalam menyampaikan tujuan dan isi kebijakan kepada target sarannya. Pada implementasi kebijakan penurunan stunting yang dilakukan oleh tim percepatan penurunan stunting, peneliti akan mengukur sikap atau kecenderungan agen pelaksana dengan melihat respon implementor terhadap kebijakan penurunan stunting, tingkat pengetahuan implementor terhadap kebijakan penurunan stunting, dan preferensi nilai yang dimiliki implementor.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa dalam tahap implementasi kebijakan penurunan stunting mendapatkan dukungan dari setiap implementor yang terkait. Dengan adanya dukungan dari setiap implementor diharapkan memberikan dampak yang positif dalam angka stunting di Kabupaten Solok. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya penurunan stunting merupakan bentuk penerimaan yang ditunjukkan oleh para implementor, karena penanganan permasalahan stunting merupakan isu nasional dan termasuk ke dalam salah satu misi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Adapun bentuk dukungan yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan bentuk upaya penurunan stunting. Dengan melakukan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa dinas tersebut memberikan dukungan terhadap kebijakan stunting yang ada di Kabupaten Solok. Bentuk dukungan lain yang diberikan dengan melakukan penyempurnaan peraturan yang sudah ada mengikuti standar aturan terbaru dalam kebijakan penurunan stunting. Namun bukan berarti tidak mendukung kebijakan yang sudah ada tetapi tetap menggunakan sampai kebijakan baru ditetapkan.

Dari segi pemahaman dapat dilihat bahwa pemahaman yang dimiliki lebih kepada pemahaman terhadap keterlibatan dari dinas tersebut. Dengan pemahaman kebijakan yang dimiliki implementor secara tidak langsung hal tersebut mendorong tercapainya tujuan dari kebijakan karena pengetahuannya terhadap kebijakan yang dilakukannya. Implementor dari kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok sudah cukup memahami kebijakan yang menjadi dasar dari penurunan stunting di Kabupaten Solok. Dengan banyaknya aktor yang terlibat pemahaman yang dimiliki oleh dinas terkait sebatas pemahaman yang merupakan tugas pokok atau keterlibatan dari dinas-dinas tersebut. Namun dengan pemahaman tersebut dinas terkait melakukan kegiatan dengan berdasarkan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut.

Preferensi nilai yang dimiliki implementor dalam menjalankan kebijakan penurunan stunting cenderung menerima kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan menjadikan upaya

penurunan stunting sebagai salah satu dari visi dan misi daerah. Dengan dijadikannya sebagai salah satu dari visi dan misi daerah menunjukkan komitmen dan keyakinan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut yaitu untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Solok. Dengan keseriusan yang dilakukan oleh para implementor dalam menurunkan angka stunting yang awalnya angka stunting sebesar 40,1% pada Tahun 2021, sekarang pada Tahun 2022 mengalami penurunan dengan persentase balita stunting sebesar 24,2%.

#### 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn lingkungan implementasi kebijakan dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan, berhasil atau gagal suatu kebijakan. Selain faktor internal yang berasal dari lingkungan implementor itu sendiri, pelaksanaan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal kebijakan tersebut. Lingkungan eksternal sendiri melihat kepada lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika ketiga lingkungan tersebut tidak mendukung maka akan berdampak kepada kinerja pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus memperhatikan dan mempertimbangkan ketiga lingkungan tersebut agar suatu pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan dengan semestinya. Berikut adalah pemaparan pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok.

Lingkungan sosial dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program meliputi respon atau opini masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. Lingkungan sosial yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok adalah masyarakat Kabupaten Solok yang merupakan target sasaran dalam kebijakan stunting tersebut. Kebiasaan atau kecenderungan masyarakat sendiri memberikan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting tersebut. Dari lingkungan sosial dapat dilihat bahwa tidak adanya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh tim koordinasi penurunan stunting dalam upaya mencapai tujuan kebijakan

penurunan stunting. Masyarakat cenderung menerima setiap upaya yang dilakukan karena pada dasarnya upaya yang dilakukan lebih cenderung kepada pemberian bantuan. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara keseluruhan menerima program yang dilakukan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan stunting di Kabupaten Solok. Namun masih terdapat masyarakat yang masih abai atau belum memiliki kesadaran dalam upaya penurunan stunting. Dengan adanya sikap abai ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting yang dilakukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sudah dilakukan upaya edukasi dan pemantauan kepada masyarakat yang abai akan hal tersebut. Dilihat dari kebiasaan yang ada di masyarakat juga memberikan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting.

Menurut Van Meter dan Van Horn lingkungan ekonomi merupakan ketersediaan sumber daya ekonomi pada lingkungan dimana kebijakan tersebut dijalankan, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Peneliti beranggapan bahwa kondisi ekonomi masyarakat cukup memberikan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting sebagai tindak lanjut terhadap bantuan yang diberikan pemerintah sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai. Dari lingkungan ekonomi dapat dilihat bahwa adanya kondisi dimana anggaran yang ada tidak mencukupi untuk menjadikan seluruh masyarakat sebagai target sasaran, namun kondisi masyarakat sendiri tidak semua mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi pada ibu hamil maupun balita. Dengan kondisi kemiskinan ekstrem saat ini menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Solok berada pada zona yang cukup memprihatinkan. Pada Tahun 2022 ini angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Solok meningkat yang sebelumnya pada Tahun 2021 sebesar 2.122 menjadi 2.811. Dengan kondisi ekonomi tersebut, masyarakat lebih berfokus untuk memenuhi kebutuhan dasar ketimbang memenuhi kebutuhan gizi pada anak balitanya maupun ibu hamil, bukan karena tidak mau untuk memenuhi namun kondisi masyarakat yang memaksa untuk melakukan hal tersebut. Sehingga upaya

yang dilakukan hanya dengan menunggu bantuan dari pemerintah untuk pemberian makanan tambahan baik untuk balita maupun ibu hamil.

Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa faktor politik memberikan pengaruh dalam upaya penurunan stunting. Faktor politik disini melihat dari lingkungan politik kebijakan tersebut dijalankan. Berdasarkan fenomena yang ditemukan peneliti dapat dilihat bahwa dari setiap unsur politik yang ada baik dari sistem pemerintahan tertinggi sampai terkecil tidak memberikan penolakan dalam upaya penurunan stunting. Adanya dukungan dari setiap lapisan politik memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan kebijakan penurunan stunting yakni menurunkan angka stunting di Kabupaten Solok. Dalam lingkungan politik dapat dilihat bagaimana dukungan yang diberikan oleh setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Melihat bagaimana dukungannya dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting belum semua aktor yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dalam upaya stunting di Kabupaten Solok. Hal ini dapat dilihat dari 17 organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam upaya penurunan stunting, pada Tahun 2022 hanya 8 organisasi perangkat daerah yang memiliki kegiatan dalam upaya stunting. Hal ini diakibatkan karena tidak semua organisasi perangkat daerah atau dinas terkait yang memiliki anggaran dalam upaya penurunan stunting. Dengan kondisi demikian dapat dilihat bahwa belum adanya dukungan penuh dari setiap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Solok dalam upaya penurunan stunting. Dengan adanya permasalahan anggaran yang ada mengakibatkan upaya-upaya yang belum maksimal yang dilakukan oleh tim koordinator penurunan stunting dalam upaya menurunkan stunting di Kabupaten Solok.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil uraian di atas dan temuan peneliti dilapangan dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penurunan stunting tersebut belum berjalan dengan baik. Mengacu pada standar dan sasaran kebijakan, sudah adanya kejelasan dalam tujuan yang akan dicapai, dan target capaian dari kebijakan tersebut sudah



ditentukan. Namun dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting, belum semua masyarakat yang menjadi target sasaran dari kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Solok.

Mengacu kepada sumber daya manusia yang ada terdapat kendala dalam ketersediaan sumber daya manusia yang belum mencukupi untuk melaksanakan kebijakan penurunan stunting, namun dapat ditutupi dengan kualitas sumber daya manusianya. Masih terdapat kendala dalam segi anggaran yang berdampak pada banyaknya target sasaran dari kebijakan tersebut. Namun dari segi ketersediaan sumber daya waktu, bisa dikatakan adanya waktu yang disediakan oleh implementor dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Hubungan antar implementor kebijakan penurunan stunting sudah berjalan dengan baik. Namun koordinasi yang ada hanya melalui rapat-rapat saja, sehingga bisa dikatakan organisasi perangkat daerah yang terlibat bekerja sendiri-sendiri berdasarkan perannya masing-masing. Sikap para implementor juga menerima kebijakan tersebut, bahkan menjadi salah satu prioritas di Kabupaten Solok dibuktikan dengan penurunan stunting masuk kedalam salah satu visi dan misi Kabupaten Solok. Disamping itu faktor ekonomi, sosial, dan politik memberikan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Adanya penerimaan yang diberikan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting tersebut, namun ada beberapa masyarakat yang acuh atau tidak peduli dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting tersebut. Dalam lingkungan ekonomi, saat ini Kabupaten Solok berada pada kondisi kemiskinan ekstrem yang menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat yang masih dibawah garis kemiskinan. Namun dari segi lingkungan politik, adanya dukungan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting tersebut.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aryastami, Ni Ketut. 2017. Kajian Kebijakan Dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting Di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, Vol 45 No 4.
- Budi, Erik Pradana, dkk. 2020. Upaya Pemerintah Desa Terhadap Penanggulangan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. *Jurnal Kesmas Untika Luwuk : Public Health Journal*, Vol 11 No 2.
- Fallo, Adriana Rodina. 2020. Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan Kecamatan Kie. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Vol 1 No 2.
- Isni, Khoiriyah dan Siti Muthia Dinni. 2020. Pelatihan Pengukuran Status Gizi Balita Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Sejak Dini Pada Ibu Di Dusun Randugunting, Sleman, Diy. Panrita Abdi - *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol 4 No 1.
- Jessyca Azzahra. Implementasi Kebijakan 5 Pilar Penurunan Stunting dan Faktor yang Mempengaruhinya di Nagari Paninggahan Kabupaten Solok. *JPGDE: Journal of Policy, Governance, Development, and Empowerment*.
- Megawati, Ginna dan Siska Wiramihardja. 2019. Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Stunting. *Dharmakarya*, Vol 8 No 3.
- Nisa, Latifa Suhada. 2018. Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia Stunting Prevention Policies In Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol 13 No 2.
- Ridua, Iren Ressie, dkk. 2020. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Menanggulangi Masalah Stunting. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, Vol 2 No 2.
- Saputri, Rini Archda. 2019. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, Vol 2 No 2.
- Shauma, Nabila Udzrotu dan Dini Gandini Purbaningrum. 2022. Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 13 No 2.
- Wigunan, Aria Raja, dkk. 2022. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmu Muqoddimah :Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol 6 No. 1.